## BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN

## DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

## KABUPATEN MAGELANG

1. **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kemudian disingkat Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2016. Kedudukan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung Kepala Daerah (Bupati), yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial, pengendalian penduduk , keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan fungsi memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya.

Tugas pokok Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah spesifik dibidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 tahun 2016 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 tahun 2016, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 3 Kepala Sub Bagian, 11 Kepala Seksi, 1 Kepala Pusat Pengolah Data, 21 Kepala Balai, 22 Kepala Sub. Bagian TU dan Tenaga Fungsional. Rincian Tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, perumusan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, kesekretariatan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menetapkan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5) Mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6) Mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan fasilitasi di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan administrasi, data dan informasi di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8) Mengarahkan dan mengendalikan pelayanan di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas.

10) Mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.

12) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.SEKRETARIS DINAS

a. Tugas

Memimpin pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Merumuskan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.

6) Menyelenggarakan pelayanan umum sesuai urusan Dinas.

7) Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran.

8) Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

9) Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.

10) Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.

11) Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa) sesuai urusan Dinas.

12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi.

14) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas.

15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum.

16) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas.

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM

a. Tugas

Memimpin pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, data, informasi, publikasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

4) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis internal dinas di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

5) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).

6) Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) atau sejenis.

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

8) Memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran non APBD.

9) Memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

10) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi, data, informasi dan publikasi Dinas.

11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas.

12) Menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas.

13) Menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunan.

14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

15) Memfasilitasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas.

16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Program.

17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program.

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

a. Tugas

Memimpin pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan.

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang penatausahaan keuangan.

4) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan.

5) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan dan perubahan.

6) Melaksanakan pengujian dokumen keuangan dan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM).

7) Melaksanakan pembayaran belanja pegawai dan belanja lainnya.

8) Melaksanakan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai.

9) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban realisasi keuangan, kegiatan dan anggaran.

10) Melaksanakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi keuangan.

11) Melaksanakan pengolahan data, analisis, penyajian informasi dan pengintegrasian data keuangan.

12) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan.

13) Melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyetoran, dan pelaporan pendapatan.

14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.

15) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi keuangan.

16) Memfasilitasi penatausahaan keuangan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas.

17) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Keuangan.

18) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Tugas

Memimpin pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.

4) Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan keluar.

5) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

6) Memfasilitasi pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

7) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.

8) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.

9) Memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

10) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia.

11) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang ketatausahaan dan administrasi umum.

12) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pengadaan dan/atau pemeliharaan barang milik daerah.

13) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.

14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang hubungan masyarakat, kerjasama dan advokasi hukum.

16) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan.

17) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Umum dan Kepegawaian.

18) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, perumusan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Merumuskan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

4) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

5) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

6) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

8) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Penanganan Fakir Miskin, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Penanganan Fakir Miskin

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Penanganan Fakir Miskin

4) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dalam pemberian bantuan sosial

5) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Penanganan Fakir Miskin

6) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Penanganan Fakir Miskin

7) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Penanganan Fakir Miskin

8) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Penanganan Fakir Miskin

9) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Sosial

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pemberdayaan Sosial

4) Melaksanakan fasilitasi sistem informasi manajemen kesejahteraan sosial

5) Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial

6) Melaksanakan fasilitasi penilaian teknis, pengumpulan data dan pemantauan pelaksanaan pemberian izin undian berhadiah dan pengumpulan sumbangan sosial

7) Melaksanakan fasilitasi kerjasama denga mitra kerja dan stakeholder yang mempunyai kepedulian sosial

8) Melaksanakan fasilitasi kegiatan penanaman nilai-nilai kepahlawanan

9) Melaksanakan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial

10) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

11) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pemberdayaan Sosial

12) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Pemberdayaan Sosial

13) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemberdayaan Sosial

14) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 KEPALA BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, perumusan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Merumuskan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

4) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

5) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

6) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

8) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Rehabilitasi Sosial

4) Melaksanakan fasilitasi pengolahan data PMKS yang menjadi sasaran garapannya

5) Melaksanakan fasilitasi rehabilitasi sosial tuna susila, lanjut usia terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, WNI Migran bermasalah sosial, korban perdagangan orang, bekerjasama dengan instansi terkait

6) Melaksanakan fasilitasi penertiban wanita tuna susila, pengemis, gelandangan dan orang terlantar bekerjasama dengan instansi terkait

7) Melaksanakan fasilitasi pemungutan anak sebagai anak angkat (adopsi anak) bekerjasama dengan instansi terkait

8) Melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan sosial terencana bekerjasama denga instansi terkait

9) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

10) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Rehabilitasi Sosial

11) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Rehabilitasi Sosial

12) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Rehabilitasi Sosial

13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial , dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

4) Melaksanakan fasilitasi pengolahan data PMKS yang menjadi sasaran garapannya

5) Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

6) Melaksanakan fasilitasi Program Keluarga Harapan atau program lainnya yang sejenis

7) Melaksanakan fasilitasi penanganan korban bencana alam dan sosial

8) Melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan sosial tidak terencana

9) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

10) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

11) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

12) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KETAHANAN KELUARGA

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, perumusan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Merumuskan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga

4) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga

5) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga

6) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga

7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga

8) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

4) Melaksanakan fasilitasi pengembangan pembangunan kependudukan, perluasan jejaring kemitraan, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

5) Melaksanakan fasilitasi pelayanan data dan informasi perkiraan pengendalian penduduk, pengolahan, dan analisis data kependudukan.

6) Melaksanakan fasilitasi pemetaan, sosialisasi, analisis dan mengkaji perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten serta menyusunnya dalam profil

7) Melaksanakan fasilitasi analisis data Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK)

8) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dan jejaring lintas sektoral dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di wilayah kabupaten

9) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

10) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

11) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

12) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. KEPALA SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

4) Melaksanakan fasilitasi pengembangan pembangunan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)

5) Melaksanakan fasilitasi pengembangan pembinaan remaja melalui kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) jalur pendidikan dan masyarakat.

6) Melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pengembangan Usaha ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pengembangan administrasi dan keuangan kelompok UPPKS

7) Melaksanakan fasilitasi pengembangan pemasaran Produk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

8) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja, dan meningkatkan jejaring dengan Asosiasi Kelompok UPPKS.

9) Melaksanakan pembinaan dan penggerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) meliputi Pembantu Pembina Keluarga Berencan Desa (PPKBD), Sub PPKBD, Paguyuban Keluarga Berencana RT (PKB RT) dalam kegiatan Program KKB PK.

10) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lintas sector pemerintah maupun swasta dalam pemberdayaan keluarga menuju perwujudan Kampung KB.

11) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

12) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

13) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

14) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

15) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, perumusan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Merumuskan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Keluarga Berencana

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Keluarga Berencana

4) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Keluarga Berencana

5) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Keluarga Berencana

6) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Keluarga Berencana

7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Keluarga Berencana

8) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. KEPALA SEKSI JAMINAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

4) Melaksanakan fasilitasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi

5) Melaksanakan fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Alat kontrasepsi bagi Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif.

6) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dan penggerakan mitra kerja dalam pelayanan keluarga berencana.

7) Melaksanakan fasilitasi Penggerakan Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

8) Melaksanakan fasilitasi Penggerakan Pelayanan Kontrasepsi Paska Persalinan dan Keguguran

9) Melaksanakan fasilitasi Pelayanan Ayoman Kegagalan penggunaan kontrasepsi dan Komplikasi berat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP)

10) Melaksanakan fasilitasi pelayanan sosialisasi perlindungan hak reproduksi dan kesehatan reproduksi

11) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

12) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

13) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

14) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

15) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2. KEPALA SEKSI ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN PENDAYAGUNAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana

4) Melaksanakan fasilitasi Advokasi KIE, penggerakan dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sesuai kearifan lokal.

5) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, mitra kerja, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

6) Melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana media luar ruang untuk keperluan informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB PK)

7) Melaksanakan fasilitasi Advokasi dan KIE menggunakan sarana Mobil Unit Penerangan (MUPEN) untuk Program KKB PK

8) Melaksanakan fasilitasi pendayagunaan dan pembinaan tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB

9) Melaksanakan fasilitasi kebijakan teknis di bidang penyuluhan advokasi dan penggerakan bagi Penyuluh KB sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

10) Melaksanakan fasilitasi bimbingan tehnis pengembangan serta monitoring dan evaluasi tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

11) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana

12) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana

13) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana

14) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana

15) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, perumusan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Merumuskan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.1. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan

4) Melaksanakan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

5) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten, kecamatan, desa.

6) Melaksanakan fasilitasi pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis, pembentukan forum, penguatan jejaring, penyediaan dan pemanfaatan data terpilah, serta bantuan teknis dalam rangka pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di kabupaten, kecamatan, dan desa

7) Melaksanakan fasilitasi penilaian evaluasi pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten (Anugerah Parahita Ekapraya dan sejenisnya)

8) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan

9) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pemberdayaan Perempuan

10) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan

11) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemberdayaan Perempuan

12) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.2. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

4) Melaksanakan fasilitasi penyediaan informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang kebijakan, korban kekerasan, ketenagakerjaan kondisi khusus dan situasi darurat terkait perempuan dan anak

5) Melaksanakan fasilitasi pembentukan kelompok kerja pengembangan informasi dan data perlindungan perempuan dan anak.

6) Melaksanakan fasilitasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

7) Melaksanakan kebijakan bidang tenaga kerja perempuan, pembentukan Kelompok Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, serikat pekerja perempuan sesuai spesifikasi pekerjaannya

8) Melaksanakan fasilitasi jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak.

9) Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak

10) Melaksanakan fasilitasi pelayanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan.

11) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

12) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

13) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

14) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

15) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.3. KEPALA SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemenuhan Hak Anak, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemenuhan Hak Anak

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak

4) Melaksanakan fasilitasi pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten.

5) Melaksanakan fasilitasi penilaian atau evaluasi bidang pemenuhan hak anak (Kabupaten Layak Anak dan sejenisnya).

6) Melaksanakan fasilitasi penilaian atau evaluasi Kecamatan Layak Anak

7) Melaksanakan fasilitasi penilaian atau evaluasi Desa/Kelurahan Layak Anak

8) Melaksanakan fasilitasi pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

9) Melaksanakan fasilitasi advokasi, sosialisasi, fasilitasi sistem data anak di satuan kerja perangkat daerah kabupaten.

10) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan data anak di wilayah kabupaten.

11) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang Pemenuhan Hak Anak

12) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pemenuhan Hak Anak

13) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang Pemenuhan Hak Anak

14) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemenuhan Hak Anak

15) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan , dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai wilayah kerjanya

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran sesuai lingkup tugasnya

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Melaksanakan pemutakhiran data Demografi, Keluarga Berencana , Tahapan Keluarga Sejahtera dan Pemetaan Keluarga serta Potensi Wilayah.

4) Melaksanakan Kerjasama dengan mitra kerja, lintas sektor terkait dalam pelaksanaan tugas program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

5) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi untuk jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana di wilayah kerja.

6) Melaksanakan penggerakan pelayanan Keluarga Berencana melalui momentum bersama mitra kerja dan lintas sektor terkait.

7) Melaksanakan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bersama mitra kerja untuk Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana, Perlindungan Hak Reproduksi, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera,Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Remaja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kelompok kegiatan.

8) Melaksanakan Penggerakan dan pengawasan Penyuluh Keluarga Berencana dan atau Petugas Lapangan KB (PLKB) sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

9) Melaksanakan Penggerakan, pembinaan dan pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang meliputi PPKBD, Sub PPKBD dan PKB RT.

10) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai wilayah kerjanya

11) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai wilayah kerjanya

12) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai wilayah kerjanya

13) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai wilayah kerjanya

14) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai wilayah kerjanya

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.1 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan administrasi persuratan, keuangan, rumah tangga, dan kepegawaian pada unit pelaksana teknis sesuai wilayah kerjanya

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.

2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Melaksanakan administrasi surat menyurat pada unit pelaksana teknis.

4) Melaksanakan administrasi keuangan pada unit pelaksana teknis.

5) Melaksanakan administrasi perlengkapan pada unit pelaksana teknis

6) Melaksanakan administrasi kepegawaian pada unit pelaksana teknis

7) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan , dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran sesuai lingkup tugasnya

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Melaksanakan penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria (NPSK) di bidang perlindungan perempuan dan anak

4) Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten

5) Melaksanakan fasilitasi layanan dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

6) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penanganan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

7) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9.1 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan administrasi persuratan, keuangan, rumah tangga, dan kepegawaian pada unit pelaksana teknis

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.

2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Melaksanakan administrasi surat menyurat pada unit pelaksana teknis.

4) Melaksanakan administrasi keuangan pada unit pelaksana teknis.

5) Melaksanakan administrasi perlengkapan pada unit pelaksana teknis

6) Melaksanakan administrasi kepegawaian pada unit pelaksana teknis

7) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan , dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya tentang rumah perlindungan sosial

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran sesuai lingkup tugasnya

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Melaksanakan pembinaan fisik, mental, sosial, emosional dan intelegensia bagi anak yang mengalami korban tindak kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan lain-lain

4) Melaksanakan bimbingan pengembangan kemampuan dan pemantapan sikap sosial bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena menyandang masalah sosial

5) Melaksanakan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami korban tindak kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan lain-lain

6) Melaksanakan penyuluhan sosial anak bagi kelayan, keluarga, masyarakat dan lembaga/institusi terkait

7) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial

8) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial

9) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial

10) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial

11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10.1 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan administrasi persuratan, keuangan, rumah tangga, dan kepegawaian pada unit pelaksana teknis

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.

2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Melaksanakan administrasi surat menyurat pada unit pelaksana teknis.

4) Melaksanakan administrasi keuangan pada unit pelaksana teknis.

5) Melaksanakan administrasi perlengkapan pada unit pelaksana teknis

6) Melaksanakan administrasi kepegawaian pada unit pelaksana teknis

7) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGOLAHAN DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

a. Tugas

Memimpin perencanaan, pengorganisasian, penyusunan konsep kebijakan daerah, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pengelolaan administrasi, pelayanan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan , dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya tentang pengolahan data penanggulangan kemiskinan

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran sesuai lingkup tugasnya

2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi bagi keluarga miskin berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan

4) Melaksanakan fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data fakir miskin

5) Melaksanakan fasilitasi pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

6) Melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan dan data penerima bantuan atau jaminan sosial lainnya.

7) Melaksanakan fasilitasi pemutakhiran data potensi sumber kesejahteraan sosial.

8) Melaksanakan fasilitasi penyaluran beras miskin (raskin) atau nama lainnya yang sejenis

9) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan

10) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan

11) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan

12) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan

13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11.1 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan administrasi persuratan, keuangan, rumah tangga, dan kepegawaian pada unit pelaksana teknis

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.

2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

3) Melaksanakan administrasi surat menyurat pada unit pelaksana teknis.

4) Melaksanakan administrasi keuangan pada unit pelaksana teknis.

5) Melaksanakan administrasi perlengkapan pada unit pelaksana teknis

6) Melaksanakan administrasi kepegawaian pada unit pelaksana teknis

7) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan instansi teknis yang menangani Urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Dalam struktur organisasi terdapat pejabat fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya maka tugas Penyuluh Keluarga Berencana sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Jabatan | : | JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA |
| Tugas | : | Melakukan penyuluhan keluarga berencana nasional dan pelayanan keluarga berencana. |

1. **Sumber Daya SKPD**

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebanyak 149 orang yang terdiri dari:

**Tabel 2.1**

**Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PENDIDIKAN** | **JUMLAH** |
| 1 | Strata 2 (S2) | 17 |
| 2 | Strata 1 (S1) | 71 |
| 3 | Sarjana Muda (D3) | 12 |
| 4 | SLTA | 49 |
| 5 | SLTP | - |
| 6 | SD | - |
|  | **JUMLAH** | **149** |

*Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinsos PPKB PPPA Th 2017*

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang paling banyak berpenddikan SLTA dan paling sedikit yang berpendidikan setingkat S2.

**Tabel 2.2**

**Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Berdasarkan Golongan Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **GOLONGAN** | **Jumlah** |
| 1 | Golongan IV | 14 |
| 2 | Golongan III | 119 |
| 3 | Golongan II | 16 |
| 4 | Golongan I | - |
|  | **JUMLAH** | **149** |

*Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinsos PPKB PPPA Th 2017*

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang paling banyak pada golongan III dan hanya ada 14 orang dengan golongan IV.

**Tabel 2.3**

**Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Berdasarkan Eselon Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **GOLONGAN** | **JUMLAH** |
| 1 | Eselon II/b | 1 |
| 2 | Eselon III/a | 1 |
| 3 | Eselon III/b | 5 |
| 4 | Eselon IV/a | 33 |
| 5 | Eselon IV/b | 7 |
| 6 | Penyuluh KB | 72 |
| 7 | Pekerja Sosial | 5 |
| 8 | JFU/ Non Penyuluh | 25 |
|  | JUMLAH | 149 |

*Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinsos PPKB PPPA Th 2017*

**Tabel2.4**

**Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Berdasarkan Pilah Gender Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELAMIN** | **JUMLAH** |
| 1 | Perempuan | 86 |
| 2 | Laki-laki | 63 |
|  | Jumlah | 149 |

*Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinsos PPKB PPPA Th 2017*

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, sebagian besar perempuan sebagian besar laki-laki.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilengkapi dengan sarana dan prasarana aparatur yang tercatat dalam aset SKPD.Gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada data berikut :

**Tabel 2.5**

**Rekapitulasi Tanah dan Bangunan**

**Milik Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| **NO.** | **NAMA ASET** | **JUMLAH** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **Tanah** | **5** | **bidang** |
|  |  |  |  |
| **B.** | **Gedung** |  |  |
| 1 | Gedung Kantor (Bag. Depan) | 1 | unit |
| 2 | Gedung Kantor (Bag. Belakang) | 1 | unit |
| 3 | Gudang | 1 | unit |
| 4 | Gedung Rumdin | 1 | unit |
| 5 | Gedung Mushola | 1 | unit |
| 6 | Bangunan Gudang Alkon | 1 | unit |
| 7 | Bangunan Gedung Tertutup Permanen | 1 | unit |
| 8 | Gedung rumah negara Gol Tipe A | 1 | unit |
| 9 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Salaman | 1 | unit |
| 10 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Salaman (Toilet) | 1 | unit |
| 11 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Kaliangkrik | 1 | unit |
| 12 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Candimulyo | 1 | unit |
| 13 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Salam | 1 | unit |
| 14 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Ngablak | 1 | unit |
| 15 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Grabag | 1 | unit |
| 16 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Tempuran | 1 | unit |
| 17 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Windusari | 1 | unit |
| 18 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Secang | 1 | unit |
| 19 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Borobudur | 1 | unit |
| 20 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Muntilan | 1 | unit |
| 21 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Tegalrejo | 1 | unit |
| 22 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Ngluwar | 1 | unit |
| 23 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Kajoran | 1 | unit |
| 24 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Pakis | 1 | unit |
| 25 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Mungkid | 1 | unit |
| 26 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Bandongan | 1 | unit |
| 27 | Bangunan Gedung Balai KB & KS Mertoyudan | 1 | unit |

*Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinsos PPKB PPPA Th 2017*

**Tabel 2.6**

**Rekapitulasi Kendaraan Milik Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA ASET** | **JUMLAH** | |
| 1 | Mobil Dinas | 5 | Unit |
| 2 | Mobil Operasional | 4 | Unit |
| 3 | Mobil pick up double cabin Unit Penerangan KB (Mupen) | 1 | Unit |
| 4 | Mobil Bus Unit Pelayanan KB (Muyan) | 1 | Unit |
| 5 | Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) | 1 | Unit |
| 6 | Sepeda Motor KB | 131 | Unit |
| 7 | Sepeda Motor Dinas | 4 | Unit |

*Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinsos PPKB PPPA Th 2017*

**Tabel 2.7**

**Rekapitulasi Peralatan Milik Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| **NO.** | **NAMA ASET** | **JUMLAH** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **Alat Kedokteran** |  |  |
| 1 | Obgyn Bed | 3 | Unit |
| 2 | Implan Kit | 25 | Unit |
|  |  |  |  |
| **B.** | **Alat Studio dan Komunikasi** |  |  |
| 1 | Intercom Unit (pesawat Aiphone) | 1 | Unit |
| 2 | Pesawat Telepon | 3 | Bh |
| 3 | Faximile | 2 | Unit |
| 4 | Camera | 5 | Bh |
| 5 | LCD Proyektor | 3 | Bh |
| 6 | Handycam | 1 | Bh |
| 7 | Tripod & Screen Proyektor | 1 | Bh |
| 8 | UPS | 2 | Bh |
| 9 | Miicrophon | 3 |  |
| 10 | Wireless | 22 | Bh |
|  |  |  |  |
| **C.** | **Alat Kantor** |  |  |
| 1 | Mesin Ketik Manual | 16 | Bh |
| 2 | Personal Computer | 32 | Unit |
| 3 | Note Book | 33 |  |
| 4 | LCD | 1 | Bh |
| 5 | OHP | 2 | Bh |
| 6 | Software GIS merk Delta-9 GIS Desktop versi 7.2 | 1 | Bh |
| 7 | Digitizer merk GTCO-Cal Comp Drawing Board IV | 1 | Bh |
| 8 | Microphone | 3 | Bh |
| 9 | Printer | 23 | Bh |
|  |  |  |  |
| **D.** | **Alat Rumah Tangga** |  |  |
| 1 | Lemari Besi | 37 | Bh |
| 2 | Almari | 23 | Bh |
| 3 | Rak | 17 | Bh |
| 4 | Palet barang dari kayu lokal uk. 90x100 | 20 | Bh |
| 5 | Filing Kabinet | 13 | Bh |
| 6 | Brankas Tanam | 1 | Bh |
| 7 | Peti Uang | 1 | Bh |
| 8 | Meja Meeting | 1 | Bh |
| 9 | Meja tulis | 4 | Bh |
| 10 | Meja Telepon | 2 | Bh |
| 11 | Meja bundar | 1 | Bh |
| 12 | Meja Komputer | 9 | Bh |
| 13 | Meja ketik | 2 | Bh |
| 14 | Meja Kerja | 73 | Bh |
| 15 | Kursi Kerja | 83 | Bh |
| 16 | Kursi besi | 3 | Bh |
| 17 | Kursi tangan | 10 | Bh |
| 18 | Kursi rapat | 134 | Bh |
| 19 | Kursi Putar | 23 | Bh |
| 20 | Kursi Lipat | 20 | Bh |
| 21 | Kursi Kerja Pejabat | 4 | Bh |
| 22 | Kursi Kerja putar | 9 | Bh |
| 23 | Kaca Bening | 10 | Bh |
| 24 | AC | 5 | Bh |
| 25 | Kipas Angin | 26 | Bh |
| 26 | Gordyn | 165 | M |
| 27 | Rel Gorden | 125 | M |
| 28 | Teralis`Jendela | 40 | M |
| 29 | Teralis Pintu | 5 | M |
| 30 | Jam Dinding | 5 | Bh |
| 31 | Dispenser PKK | 1 | Bh |
| 32 | Exhaust Fan | 7 | Bh |
| 33 | Troly barang dorong | 1 | Bh |
| 34 | Manual/Hand Jack Palet | 1 | Bh |
| 35 | Vacum Cleaner Panasonik | 1 | Bh |
| 36 | Plastik terpal transparant uk. 5x5 m2 | 4 | Bh |
| 37 | Fire extinguisher 25 kg whel carrying | 1 | Bh |
| 38 | Tangga Aluminium fortuna, 2m | 1 | Bh |
| 39 | meja kursi tamu(ZICE) | 13 | Set |
| 40 | White board | 16 | Bh |
| 41 | Papan nama | 12 | Bh |

*Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinsos PPKB PPPA Th 2017*

1. **Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2014 sampai 2019 telah melakukan beberapa program dan kegiatan adapun hasil kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,**

**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Tahun 2009-2013**

| **NO** | **Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD** | **Target SPM** | | | **Target IKK** | | **Target Indikator Lainnya** | | **Target Renstra SKPD Tahun** | | | | | | | | | | **Realisasi Capaian Tahun** | | | | | | | | | | **Rasio Capaian pada Tahun** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2009** | | **2010** | | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2009** | | **2010** | | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** | | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **Urusan Keluarga Berencana** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun | 3,5 | % | |  |  |  |  | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | 1,46 | % | 1,24 | % | 0,69 | % | 1,22 | % | 1,50 | % |  |  |  |  |  |
| 2 | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif | 65 | % | |  |  |  |  | 76,83 | % | 76,73 | % | 76,63 | % | 76,93 | % | 77,13 | % | 76,00 | % |  | % |  | % | 81,19 | % | 80,53 | % | 99% | 0% | 0% | 105,54% | 104% |
| 3 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) | 5 | % | |  |  |  |  | 11 | % | 11,80 | % | 10,40 | % | 9,80 | % | 9,30 | % | 13,05 | % | 11,33 | % | 10,16 | % | 9,13 | % | 9,81 | % | 119% | 96% | 98% | 93,16% | 105% |
| 4 | Cakupan Keluarga Bina Keluarga Balita ber KB | 70 | % | |  |  |  |  | 75,00 | % | 75,30 | % | 79,35 | % | 80,40 | % | 87,45 | % | N/A | | N/A | | N/A | | 81,28 | % | 79,13 | % |  |  |  | 101,09% | 90% |
| 5 | Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber - KB | 87 | % | |  |  |  |  | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | 79,79 | % | 81,00 | % |  |  |  |  |  |
| 6 | Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB). 1 Petugas/2 Desa/ Kelurahan. | 30 | % | |  |  |  |  | 50,00 | % | 50,00 | % | 50,00 | % | 50,00 | % | 50,00 | % | 29,30 | % | 29,84 | % | 28,23 | % | 25,00 | % | 22,31 | % | 59% | 60% | 56% | 50,00% | 45% |
| 7 | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). 1 (satu) Petugas setiap Desa/ Kelurahan | 100 | % | | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100% | 100% | 100,00% |  |
| 8 | Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi Permintaan Masyarakat | 30 | % | |  |  | 30 |  | 30 | % | 30 | % | 30 | % | 30 | % | 30 | % | 30 | % | 30 | % | 30 | % | 30 |  | 30,00 |  | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% |
| 9 | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan | 100 | % | |  |  |  |  | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 |  | 100,00 |  | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% |
| 10 | Peningkatan jumlah pasangan subur sebagai peserta KB Aktif (Pelayanan KIE) |  |  | |  |  |  |  |  | Akseptor |  | Akseptor | 1 | neon box | 6.000 | PUS | 3000 | Akseptor |  | Akseptor |  | Akseptor | 1 | neon box | 6.000 | PUS | 3000 | Akseptor |  |  | 100% | 100,00% | 100% |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | bilboard |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | bilboard |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | banner |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | banner |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 11 | Terlindunginya Hak Reproduksi Akseptor (Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu) |  |  | |  |  |  |  |  | Akseptor |  | Akseptor | 15.000 | Akseptor | 420 | Akseptor | 410 | Akseptor baru |  | Akseptor baru |  | Akseptor baru | 15.000 | Akseptor | 420 | Akseptor | 410 | Akseptor baru |  |  | 100% | 100,00% | 100% |
|  |  | |  |  |  |  |  | Akseptor gagal |  | Akseptor gagal |  | Akseptor gagal |  | Akseptor gagal | 10 | Akseptor gagal |  | Akseptor gagal |  | Akseptor gagal |  | Akseptor gagal |  | Akseptor gagal | 10 | Akseptor gagal |  |  |  |  | 100% |
| 12 | Terlaksananya Pembinaan bagi akseptor KB (Pembinaan Peserta KB Aktif dan Peningkatan Pencapaian Sasaran Kinerja Program KB) |  |  | |  |  |  |  |  | orang |  | orang | 15.000 | orang | 15.000 | orang | 400 | orang |  | orang |  | orang | 15.000 | orang | 15.000 | orang | 400 | orang |  |  | 100% | 100,00% | 100% |
| 13 | Meningkatnya Jumlah peserta KB melalui penyelenggaraan lewat 3 momentum ( TNI Manunggal KB Kes, Bhakti bhayangkara KB Kes, dan Gerak Kesatuan KB Kes) |  |  | |  |  |  |  | 3 | kegiatan | 3 | kegiatan | 9000 | PB | 3000 | PB | 3 | Kegiatan | 3 | Kegiatan | 3 | kegiatan | 9000 | PB | 3000 | PB | 3 | kegiatan | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% |
| 14 | Tersedianya pengadaan barang fasilitasi Peningkatan Pelayanan Program KB (Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB DAK) |  |  | |  |  |  |  |  | gedung |  | gedung | 1 | mobil mupen | 6 | gedung | 3 | gedung |  | gedung |  | gedung | 1 | mobil mupen | 6 | gedung | 3 | gedung |  |  | 100% | 100,00% | 100% |
|  |  | |  |  |  |  |  | IUD Kit |  | IUD Kit | 1 | mobil pely KB |  | IUD Kit | 50 | IUD Kit |  | IUD Kit |  | IUD Kit | 1 | mobil pely KB |  | IUD Kit | 50 | IUD Kit |  |  | 100% |  | 100% |
|  |  | |  |  |  |  |  | Implan KIT |  | Implan KIT | 1 | gedung KB/KS |  | Implan KIT | 35 | Implan KIT |  | Implan KIT |  | Implan KIT | 1 | gedung KB/KS |  | Implan KIT | 35 | Implan KIT |  |  | 100% |  | 100% |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gybed | 3 | Gybed |  | Gybed |  | Gybed |  |  |  | Gybed | 3 | Gybed |  |  |  |  | 100% |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PPA | 22 | PPA |  | PPA |  | PPA |  |  |  | PPA | 22 | PPA |  |  |  |  | 100% |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | buah sepeda motor PLKB |  | buah sepeda motor PLKB |  | buah sepeda motor PLKB |  | buah sepeda motor PLKB |  |  | 4 | buah sepeda motor PLKB |  | buah sepeda motor PLKB |  |  |  | 100,00% |  |
| 15 | Tersedianya pengadaan barang fasilitasi Peningkatan Pelayanan Program KB (Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB SILPADAK) |  |  | |  |  |  |  |  | buah komputer |  | buah komputer |  |  | 6 | buah komputer | 1 | buah komputer |  | buah komputer |  | buah komputer |  |  | 6 | buah komputer | 1 | buah komputer |  |  |  | 100,00% | 100% |
| 16 | Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) |  |  | |  |  |  |  |  | orang |  | orang | 800 | orang |  | orang | 0 | orang |  | orang |  | orang | 800 | orang |  | orang | 0 | orang |  |  | 100% |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | kec |  | kec | 16 | kec | 16 | kec | 0 | Kec |  | kec |  | kec | 16 | kec | 16 | kec | 0 | kec |  |  | 100% | 100,00% |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | orang |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | orang |  |  |  |  |  | 100,00% |  |
| 17 | Peningkatan Pengetahuan bagi Remaja tentang KRR/PKBR (Penguatan Kapasitas Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program KRR) |  |  | |  |  |  |  |  | kelompok |  | kelompok | 35 | kelompok | 21 | kelompok | 35 | Kelompok |  | Kelompok |  | kelompok | 35 | kelompok | 21 | kelompok | 35 | kelompok |  |  | 100% | 100,00% | 100% |
| 18 | Pelatihan Pendidikan Ketrampilan Hidup dan Pendidikan Kehidupan berkeluarga Bagi Pengurus OSIS |  |  | |  |  |  |  |  | sekolah SMP/MTS) |  | sekolah SMP/MTS) | 250 | orang | 18 | sekolah SMP/MTS) | 0 | sekolah SMP/MTS) |  | sekolah SMP/MTS) |  | sekolah SMP/MTS) | 250 | orang | 18 | sekolah SMP/MTS) | 0 | sekolah SMP/MTS) |  |  | 100% | 100,00% |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 | orang |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 | orang |  |  |  |  |  | 100,00% |  |
| 19 | Meningkatnya pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang ( pelayanan KB Medis Operasi) |  |  | |  |  |  |  |  | orang MOW |  | orang MOW | 80 | orang MOW | 120 | orang MOW | 114 | orang MOW |  | orang MOW | 945 | orang MOW | 785 | orang MOW | 647 | orang MOW | 596 | orang MOW |  |  | 981% | 539,17% | 523% |
| 20 | Terlayaninya pserta KB Baru Implan (Pelayanan Pemasangan Implant) |  |  | |  |  |  |  |  | Akseptor |  | Akseptor | 492 | Akseptor Cabut Implant | 1160 | Akseptor | 1.160 | Akseptor Baru Implant |  | Akseptor | 4012 | Akseptor Baru Implant | 3619 | Akseptor Baru Implant | 3005 | Akseptor Baru Imlant | 4.039 | Akseptor Baru Implant |  |  | 736% | 259,05% | 348% |
| 21 | Tersedianaya kebutuhan alat kontrasepsi (Penyediaan Pelayanan KB danAlat Kontrasepsi) |  |  | |  |  |  |  |  | Akseptor PB |  | Akseptor PB | 300 | Akseptor PB | 21 | Kecamatan | 4.504 | Akseptor PB |  | Akseptor PB | 35.342 | Akseptor PB | 19.945 | Akseptor PB | 19.722 | Akseptor PB | 19.683 | Akseptor PB |  |  | 6648% | 93914,29% | 437% |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | Akseptor KB Ulang | 40 | Kinik KB |  |  |  |  |  |  | 150 | Akseptor KB Ulang | 40 | Kinik KB |  |  |  |  | 100% | 100,00% |  |
| 22 | Terwujudnya Peningkatan Peran PPKBD (Operasional PPKBD) |  |  | |  |  |  |  | 372 | orang PPKBD | 372 | orang PPKBD | 372 | orang PPKBD | 372 | orang PPKBD | 372 | orang PPKBD | 372 | orang PPKBD | 372 | orang PPKBD | 372 | orang PPKBD | 372 | orang PPKBD | 372 | orang PPKBD | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% |
| 23 | Meningkatnya Kegiatan Antar Kelompok UPPKS (Fasilitasio Pertemuan Assosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan Pelatihan Kewirausahaan bagi keluarga Pra KS dan KB ) |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | Kecamatan |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 24 | Meningkatnya Kemampuan Berwirausaha bagi anggota UUPKS dan Kemitraan dengan sektor lain (Pelatihan Kewirausahaan dan Kemitrausahaan Bagi Anggota Kelompok UPPKS |  |  | |  |  |  |  |  | orang |  | orang |  | orang |  | orang | 320 | orang |  | orang |  | orang |  | orang |  | orang | 320 | orang |  |  |  |  | 100% |
| 25 | Meningkatnya Pengetahuan Pendidik Sebaya(Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya) |  |  | |  |  |  |  |  | orang |  | orang |  | orang |  | orang | 108 | orang |  | orang |  | orang |  | orang |  | orang | 108 | orang |  |  |  |  | 100% |
|  | Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR |  |  | |  |  |  |  |  | kelompok |  | kelompok | 10 | kelompok |  | kelompok | 0 | Kelompok |  | Kelompok |  | kelompok | 10 | kelompok |  | kelompok | 0 | kelompok |  |  | 100% |  |  |
| 24 | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengelola PIK KRR ( Fasilitasi pelayanan Forum KRR bagi Kelompok Remaja dan kelompok sebaya disekolah) |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | orang |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | orang |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 25 | Meningkatnya partisipasi anak dalam memenuhi hak-hanya (Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupaten Magelang |  |  | |  |  |  |  |  | orang |  | orang | 234 | orang | 65 | orang | 50 | orang |  | orang |  | orang | 234 | orang | 65 | orang | 50 | orang |  |  | 100% | 100,00% | 100% |
| **Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 | | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cakupan Perempuan Dan anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana KTP/A Dan PPT/PKT Rumah Sakit | 100 | | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cakupan Layanan Rehauilitasi Sosial yang Di berikan oleh petugas rehabilitasi sosia terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu | 75 | | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cakupan Layanan Bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu | 75 | | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cakupan Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 80 | | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatan layanan Bantuan Hukum | 50 | | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cakupan Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 50 | | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 100 | | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Terlaksananya program perlindungan anak dalam setiap perencanaan pembangunan (Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak) |  | |  |  |  |  |  |  | desa |  | desa |  | desa |  | desa | 14 | desa |  | desa |  | desa |  | desa |  | desa | 14 | desa |  |  |  |  | 100% |
|  | |  |  |  |  |  |  | kecamatan |  | kecamatan |  | kec |  | kec |  | Kec |  | kec |  | kec |  | kec |  | kec |  | kec |  |  |  |  |  |
| 10 | Pendidikan dan Pelatihan Peran Serta Kesetaraan Gender |  | |  |  |  |  |  |  | orang |  | orang |  | orang |  | orang | 70 | orang |  | orang |  | orang |  | orang |  | orang | 0 | orang |  |  |  |  | 0% |
| 11 | Terselenggaranya pengarustamaan gender dalam setiap kebijakan program dan proyek atau kegiatan pembangunan (Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender (Advokasi) ) |  | |  |  |  |  |  |  | SKPD |  | SKPD | 30 | SKPD | 30 | SKPD | 30 | SKPD |  | SKPD |  | SKPD | 30 | SKPD | 30 | SKPD | 30 | SKPD |  |  | 100% | 100,00% | 100% |
|  | |  |  |  |  |  |  | kec |  | kec | 6 | kec | 6 | kec | 21 | Kec |  | kec |  | kec | 6 | kec | 6 | kec | 21 | kec |  |  | 100% | 100,00% | 100% |
| 12 | Peningkatan pemahaman untuk melaksanakan perencanaan didalam berbagai aspek pembagunan yang responsif gender (Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) |  | |  |  |  |  |  |  | kec |  | kec | 50 | masyarakat mitra | 50 | masyarakat mitra | 2 | Kec |  | kec |  | kec | 50 | masyarakat mitra | 50 | masyarakat mitra | 2 | kec |  |  | 100% | 100,00% | 100% |
|  | |  |  |  |  |  |  | desa |  | desa | 2 | desa | 2 | desa | 2 | desa |  | desa |  | desa | 2 | desa | 2 | desa | 2 | desa | #### | #DIV/0! | 100% | 100,00% | 100% |
| 13 | Terlaksananya program perlindungan anak dalam setiap perencanaan pembangunan (Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak) |  | |  |  |  |  |  |  | kec |  | kec |  | kec |  | kec | 0 | Kec |  | kec |  | kec |  | kec |  | kec | 0 | kec |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | desa |  | desa |  | desa |  | desa | 14 | desa |  | desa |  | desa |  | desa |  | desa | 0 | desa |  |  |  |  | 0% |
| 14 | Terlayaninya korban kekerasan (Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak |  | |  |  |  |  |  |  | kec |  | kec | 100 | kasus | 100 | kasus |  | kasus |  | kasus |  | kasus | 100 | kasus | 100 | kasus |  | kasus |  |  | 100% | 100,00% |  |
| 15 | Terselenggaranya pertemuan evaluasi kegiatan advokasi, pemberdayaan keluarga sejahtera , perlindungan anak dan perempuan KS dan Perlindungan perempuan dan anak ( Pemberdayaan KS dan Perlindungan Perempuan dan Anak ) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | orang | 137 | orang |  |  |  |  |  |  | 137 | orang | 137 | orang |  |  |  |  | 100% | 100,00% |  |
|  | Akselerasi Program PKHP di Kabupaten Magelang ( Sosialisasi dan Pembentukan Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ) |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | kecamatan | 6 | kec |  |  |  |  |  |  | 6 | kecamatan | 6 | kec |  |  |  |  | 100% | 100,00% |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | SKPD | 30 | SKPD |  |  |  |  |  |  | 30 | SKPD | 30 | SKPD |  |  |  |  | 100% | 100,00% |  |
| 16 | Meningkatnya pemahaman tentang UUPA dan UU PKDRT (Advokasi Isu Perlindungan Perempuan dan Anak) |  | |  |  |  |  |  |  | kec |  | kec |  | kec |  | kec | 10 | Kec |  | kec |  | kec |  | kec |  | kec | 10 | kec |  |  |  |  | 100% |
| 17 | Meningkatnya minat dan kemampuan belajar siswa (Pemberian Makan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) |  | |  |  |  |  |  |  | siswa |  | siswa |  | siswa |  | siswa | 896 | siswa |  | siswa |  | siswa |  | siswa |  | siswa | 896 | siswa |  |  |  |  | 100% |
| 18 | Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Magelang |  | |  |  |  |  |  |  | DWP |  | DWP |  | DWP |  | DWP | 57 | DWP |  | DWP |  | DWP |  | DWP |  | DWP | 57 | DWP |  |  |  |  | 100% |
| 19 | Terselenggaranya kegiatan advokasi dan evaluasi kegiatan ketahanan keluarga (Pemberdayaan Institusi Masyarakat (IMP), seleksi keteladanancatur bina, keluarga harmonis, UPPKS Teladan, PLKB danPPKBD teladan dan Harganas) |  | |  |  |  |  |  |  | kelompok BKB |  | kelompok BKB |  | kelompok BKB |  | kelompok BKB | 21 | kelompok BKB |  | kelompok BKB |  | kelompok BKB |  | kelompok BKB |  | kelompok BKB | 21 | kelompok BKB |  |  |  |  | 100% |
|  | |  |  |  |  |  | 21 | kelompok BKR | 21 | kelompok BKR |  | kelompok BKR | 21 | kelompok BKR | 21 | kelompok BKR | 21 | kelompok BKR | 21 | kelompok BKR |  | kelompok BKR | 21 | kelompok BKR | 21 | kelompok BKR | 100% | 100% |  | 100,00% | 100% |
|  | |  |  |  |  |  |  | kelompok BKL |  | kelompok BKL |  | kelompok BKL |  | kelompok BKL | 21 | kelompok BKL |  | kelompok BKL |  | kelompok BKL |  | kelompok BKL |  | kelompok BKL | 21 | kelompok BKL |  |  |  |  | 100% |
|  | |  |  |  |  |  |  | Kelompok IMP |  | Kelompok IMP | 351 | orang | 351 | orang | 21 | Kelompok IMP |  | Kelompok IMP |  | Kelompok IMP | 351 | orang | 351 | orang | 21 | Kelompok IMP |  |  | 100% | 100,00% | 100% |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana untuk Kabupaten Magelang secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Sebagai gambaran untuk tahun 2016 tingkat Rasio Prevalensi PUS yang berKB atau *Contraceptive Prevalence Rate* (*CPR*) 81.19 %, angka ini melampaui target nasional yang hanya 65%. Angka kelahiran total atau*Total Fertility Rate* (*TFR*) mencapai sebesar 2.5%. Namun demikian Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) Kabupaten Magelang masih cukup besar, pada tahun 2013 mencapai 13 %. Hal ini masih cukup jauh dibandingkan target nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang hanya sebesar 5%

Program KB sendiri pada dasarnya memiliki tujuan untuk:

* + - * 1. Menurunkan angka kelahiran agar tidak melebihi kemampuan tingkat produksi
        2. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak agar mencapai keluarga sejahtera;

Diharapkan agar dengan program KB sumber daya manusia yang ada dapat meningkat kualitasnya, ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemampuan yang seimbang dalam penguasaan iptek diharapkan dapat mengelola sumber daya alam yang ada sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.

**Data 2.9**

**Kinerja Makro**

**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**Kabupaten Magelang Tahun 2014-2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR** | **Tahun** | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |  |  |
| Rata-rata jumlah anak per keluarga | 1,73 | 1,31 | 1,27 |  |  |
| Rasio akseptor KB |  | 77,93 | 79,77 |  |  |
| Rasio *Total Fertility Rate* (TFR) |  | 2,3 |  |  |  |
| Rasio *Drop Out* (DO) KB | 8,37 | 7,69 | 8,13 |  |  |
| Keluarga Pra Sejahtera | 92,74 | 91,82 | 91,11 |  |  |
| Keluarga Sejahtera I (KK) | 63,78 | 64,32 | 66,34 |  |  |
| Keluarga Sejahtera II (KK) | 72,30 | 75,53 | 77,88 |  |  |

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Kurangnya tenaga Penyuluh KB sebagai lini pertama dalam keberhasilan pelaksanaan program KB

2. Masih tumbuhnya nilai budaya dimasyarakat yang menganut nilai banyak anak banyak rejeki, dan anggapan bahwa laki-laki memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perempuan. Sehingga keluarga yang sudah memiliki anak lebih dari dua misalnya tetapi dengan jenis kelamin perempuan tetap akan berusaha memiliki anak lagi dengan harapan berjenis kelamin laki- laki .

3. Kurangnya sarana prasarana untuk mobilitas atau operasional dalam melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana. Kabupaten Magelang dengan wilayah yang cukup luas terbagi dalam 21 Kecamatan dengan kondisi geografis yang cukup sulit membutuhkan sarana prasarana mobilitas yang cukup banyak, sementara sarana yang ada belum mencukupi misalnya mobil untuk mendistribusikan alat kontrasepsi dan untuk pelayanan akseptor pada saat akan melakukan tindakan pemasangan atau pelepasan kontrasepsi.

1. **Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Pembagian peran secara seksual atas laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan di rumah (domestik privat) dan laki-laki diluar rumah menyebabkan keterbatasan perempuan untuk mendapatkan akses ekonomi, sosial dan politik. Selain menjadi korban diskriminasi perempuan juga riskan menjadi obyek tindak kekerasan.

**Data 2.10**

**Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR** | **Tahun** | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |  |  |
| Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | 2,40 | 2,41 | 2,42 |  |  |
| Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) | 66,90 | 59,79 | 59,66 |  |  |
| Persentase keterlibatan perempuan di legislative (%) | 12 | 12 | 12 |  |  |
| Indeks Pembangunan Perempuan (IPG) | 68,20 | 61,25 | 69,15 |  |  |
| Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) | 61,25 | 68,20 | 60,79 |  |  |
| Jumlah Anak dengan Disabilitas (anak) | 2.827 | 2.318 | 2.482 |  |  |
| Jumlah Anak Terlantar (anak) | 796 | 810 | 1.601 |  |  |
| Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)(anak) | 87 | 128 | 141 |  |  |
| Jumlah Anak PMKS (anak) | 4.190 | 3.654 | 4.598 |  |  |
| Jumlah Kekerasan terhadap Anak (anak) | 13 | 49 | 41 |  |  |
| Rasio KDRT | 0,013 | 0,023 | 0,030 |  |  |
| Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) | 100 | 100 | 100 |  |  |

1. **Capaian Kinerja Urusan Sosial**

Program-program Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga Desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Sehingga, berbagai upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan harus memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ini, yakni : (i) mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya, (ii) meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/ usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui Teknologi Tepat Guna.

Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tujuan umum untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) RTM dan tujuan khusus untuk :

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karateristik tipologi Desa/Kelurahan.
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/  Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

**Data 2.11**

**Kinerja Makro**

**UrusanSosial**

**Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR** | **Tahun** | | | | |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 63/372 | 63/372 | 63/372 | 63/372 | 63/372 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 21/372 | 21/372 | 21/372 | 21/372 | 21/372 |
| Jumlah LSM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LPM berprestasi | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| PKK aktif | 28.605 | 32.201 | 32.201 | 32.201 | 32.201 |
| Posyandu aktif | 2.233 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 |
| Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Rp) | 7.939.570.025 | 8.710.891.129 | 9.363.610.275 | 9.475.131.807 | 9.904.460.450 |
| Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 63/372 | 63/372 | 63/372 | 63/372 | 63/372 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 21/372 | 21/372 | 21/372 | 21/372 | 21/372 |

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar Visi, Misi dan program yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat tercapai atau terealisasi maka harus ada dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan Renstra akan menghasilkan rencana kegiatan SKPD dalam hal ini Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi penganggaran. Pagu indikatif anggaran Bapermas Perempuan dan KB, yang akan berlaku selama lima tahun. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapermas Perempuan dan KB dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan program pembangunan daerah.

Sejalan dengan pagu atau plafon anggaran yang dialokasi untuk setiap SKPD, karena kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pengelolaan keuangan di SKPD dalam hal ini Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangannya.Kegiatan pembangunan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan pembiayaan dari 4 (empat) sumber, yaitu APBD Kabupaten Magelang, DAK ( Dana Alokasi Khusus ) Bidang KB, Bantuan Gubernur Jawa Tengah, dan DIPA BKKBN Povinsi Jawa Tengah. Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Kabupaten Magelang sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Bapermas Perempuan dan KB. Sejalan dengan semakin baiknya kemampuan keuangan daerah dari tahun ke tahun.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.13** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kabupaten Magelang** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uraian \*\*\*)** | **Anggaran pada Tahun ke-** | | | | | **Realisasi Anggaran pada Tahun** | | | | | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun** | | | | | **Rata-rata Pertumbuhan** | |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Pendapatan Asli Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hasil retribusi daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Lain-lain PAD yang Sah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| **BELANJA DAERAH** | **22.668.233.000** | **14.404.532.000** | **13.720.898.000** | **14.993.885.000** | **17.207.591.400** | **20.160.924.980** | **13.315.753.590** | **13.443.442.248** | **13.871.895.050** | **15.982.592.549** | **88,94** | **92,44** | **97,98** | **92,52** | **92,88** | **(1.092.128.320)** | **(835.666.486)** |
| **Belanja tidak langsung** | **9.068.791.000** | **9.479.476.000** | **9.187.289.000** | **10.359.045.000** | **10.305.675.000** | **8.513.426.098** | **8.863.502.118** | **9.064.606.777** | **9.430.332.980** | **9.621.820.009** | **93,88** | **93,50** | **98,66** | **91,03** | **93,36** | **247.376.800** | **221.678.782** |
| Belanja pegawai | 9.068.791.000 | 9.479.476.000 | 9.187.289.000 | 10.359.045.000 | 10.305.675.000 | 8.513.426.098 | 8.863.502.118 | 9.064.606.777 | 9.430.332.980 | 9.621.820.009 | 93,88 | 93,50 | 98,66 | 91,03 | 93,36 | 247.376.800 | 221.678.782 |
| **Belanja langsung** | **13.599.442.000** | **4.925.056.000** | **4.533.609.000** | **4.634.840.000** | **6.901.916.400** | **11.647.498.882** | **4.452.251.472** | **4.378.835.471** | **4.441.562.070** | **6.360.772.540** | **85,65** | **90,40** | **96,59** | **95,83** | **92,16** | **(1.339.505.120)** | **(1.057.345.268)** |
| Belanja pegawai | 10.146.922.000 | 388.957.900 | 560.165.000 | 670.252.000 | 1.106.950.600 | 9.549.447.563 | 369.965.800 | 549.024.800 | 659.646.700 | 1.083.242.500 | 94,11 | 95,12 | 98,01 | 98,42 | 97,86 | (1.807.994.280) | (1.693.241.013) |
| Belanja barang dan jasa | 2.254.981.000 | 2.364.974.100 | 2.396.453.000 | 2.722.189.000 | 4.527.453.800 | 1.970.179.319 | 1.912.436.422 | 2.258.639.521 | 2.555.420.070 | 4.173.633.459 | 87,37 | 80,87 | 94,25 | 93,87 | 92,19 | 454.494.560 | 440.690.828 |
| Belanja modal | 1.197.539.000 | 2.171.124.000 | 1.576.991.000 | 1.242.399.000 | 1.267.512.000 | 127.872.000 | 2.169.849.250 | 1.571.171.150 | 1.226.495.300 | 1.103.896.581 | 10,68 | 99,94 | 99,63 | 98,72 | 87,09 | 13.994.600 | 195.204.916 |
| **Total** | **(22.668.233.000)** | **(14.404.532.000)** | **(13.720.898.000)** | **(14.993.885.000)** | **(17.207.591.400)** | **(20.160.924.980)** | **(13.315.753.590)** | **(13.443.442.248)** | **(13.871.895.050)** | **(15.982.592.549)** | **88,94** | **92,44** | **97,98** | **92,52** | **92,88** | **1.092.128.320** | **835.666.486** |

Dalam rangka percepatan revitalisasi program KB di seluruh Kabupaten/Kota, Pemerintah pusat melalui BKKBN Pusat mengalokasikan DAK ( Dana Alokasi Khusus ) bidang KB. Dana Alkokasi Khusus ( DAK ) dialokasikan untuk membiayai pengadaan sarana kegiatan program KB di Kabupaten Kota.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB di Kabupaten Magelang dialokasikan mulai tahun 2014 sebesar Rp.1.247.920.000,00 dialokasikan untuk Balai Penyuluhan KB/KS 4 bangunan dengan anggaran Rp.640.000.000,-, Mobil Box untuk distribusi alat kontrasepsi sebesar Rp. 300.000.000,- Mebelair , Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebanyak 5 set sebesar Rp. 85.000.000,- Komputer dan printer sebanyak 5 set sebesar Rp. 65.0000.000 dan BKB Kit sebesar Rp. 157.920.000,-.

**Tabel 2.14**

**Dana Alokasi Khusus Program KB Tahun 2009-2014**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **ANGGARAN** | | | **REALISASI** | | |
| **DAK MURNI** | **PENDAM**  **PINGAN** | **Jumlah** | **DAK MURNI** | **PENDAM**  **PINGAN** | **Jumlah** |
| 2011 | 1.175.700.000 | 129.912.000 | 1.305.612.000 | 1.145982.000 | 151.439.500 | 1.297.421.500 |
| 2012 | 1.099.720.00 | 155.004.000 | 1.254.724.000 | 1.084.130.000 | 146.537.050 | 1.230.667.050 |
| 2013 | 1.098.770.000 | 190.540.00 | 1.289.310.000 | 950.346.268 | 161.921.063 | 1.112.267.331 |

DIPA KB ini adalah anggaran yang berasala dari APBN yang diperuntukan penngkatran pelayanan KB. Dibawah ini dapat dilihat peruntukan DIPA KB Tahun Anggaran 2013.

**Tabel 2.15**

**Anggaran KB yang berasal dari DIPATahun Anggaran 2013**

| **NO** | **Kegiatan** | **Anggaran** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Penyusunan Rancanagan Pengendalian Penduduk | 21.930.000 |
| 2. | Peningkatan Pembinaan Kesetaraan Ber KB di Klinik KB Pemerintah dan Swasta | 1.893.550.000 |
| 3. | Peningkatan Pembinaan Dan Ketahanan Pemberdayaan Keluarga | 780.881.000 |
| 4. | Advokasi dan Penggerakkan Di Provinsi | 13.000.000 |
| 5. | Kerjasama dengan Mitra Kerja | 10.675.000 |
| 6. | Pengelolaan Data Informasi Pembangunan KB di Prov | 246.505.000 |
| 7. | Penelitian Kependudukan dan KB | 3.650.000 |
| 8. | Dokumen Perencanaan Program KKB | 19.400.000 |
| 9. | Layanan Perkantoran | 3.720.000 |

**Tabel 2.16**

**Bantuan Gubernur untuk TMMD Tahun 2009-2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Bantuan Gubernur | APBD Kabupaten | Jumlah |
| 2009 | 286.000.000 | 138.000.000 | 424.000.000 |
| 2010 | 260.000.000 | 166.000.000 | 426.000.000 |
| 2011 | 290.000.000 | 156.000.000 | 446.000.000 |
| 2012 | 310.000.000 | 171.000.000 | 481.000.000 |
| 2013 | 310.000.000 | 171.000.000 | 481.000.000 |
| 2014 | 320.000.000 | 170.000.000 | 490.000.000 |

Kegiatan TMMD dilaksanakan melalui kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, dimana setiap tahunnya diperuntukan pembangunan jalan untuk dua desa.

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang**

**2.4.1 Urusan Keluarga Berencana**

Indikator pelayanan KB untuk Kabupaten Magelang dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target nasional bahkan melampaui target seperti misalnya , Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif 65 % untuk Kabupaten Magelang 75.23 %, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB 70 % mencapai nilai 78.69% dan kecuali untuk Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5,0 %. Pasangan ini meliputi pasangan Subur yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak lagi ditunda Tidak tercovernya secara menyeluruh data PUS Un Meetned merupakan salah satu faktor penghambatnya. Kondisi DO KB untuk Kabupaten magelang juga masih relatif tinggi, terlepas dari kesadaran PUS untuk mengikuti program KB faktor yang berpengaruh adalah :

1. PUS ingin punya anak
2. Kegagalan penggunaan alat kontrasepsi
3. Komplikasi penggunaan alat kontrasepsi
4. Menopause

Kurangnya tenaga penyuluh KB dilapangan menjadi salah satu faktot penyebab, 1 orang penyuluh membina 4 desa dengan kondisi geografis yang cukup luas menjadi kendala tersendiri untuk mengadakan pembinaan secara terfokus.

**Tabel 2.17**

**Komparasi Indikator Pengendalian Jumlah Pendukduk**

**Antara Kabupaten Magelang Dengan Provinsi Jawa Tengah**

**Tahun 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KETERANGAN** | **KABUPATEN MAGELANG** | **PROVINSI JAWA TENGAH** | **%** |
| 1 | Jumlah PUS | 218.736 | 6.787.567 | 3.22% |
| 2 | Peserta KB Aktif | 164.561 | 5.417.608 | 3.33% |
| 3 | Drop Out | 17.85% | 14,72% | 88.31% |
| 4 | Unetneed | 2.5% | 10.22% | 24.46% |

Untuk pengadaan alat kontrasepsi Kabupaten Magelang sudah dapat memenuhi kebutuhan pengadaan sesuai dengan yang dibutuhkan karena penyediaan obat dan alat kontrasepsi dari Pusat/Provinsi maupun Mandiri sudah mencukupi.

* + 1. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka perlu dikaji data-data tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut.

**Tabel 2.18**

**Data Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender**

**Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KASUS** | **2012** | **Sep 2013** |
| 1 | Korban kekerasan menurut jenis kelamin |  |  |
|  | Laki-laki | 2 | 2 |
|  | Perempuan | 71 | 41 |
| 2 | Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur |  |  |
|  | Anak-anak | 33 | 14 |
|  | Dewasa | 40 | 29 |
| 3 | Pelaku Kekerasan |  |  |
|  | Laki-laki | 60 | 45 |
|  | Perempuan | 2 | 2 |
| 4 | Jenis Kekerasan yang dialami korban |  |  |
|  | Fisik | 16 | 25 |
|  | Phisikis | 28 | 39 |
|  | Seksual | 8 | 18 |
|  | Penelantaran | 2 | 16 |
|  | Trafficking | 16 | 1 |
|  | Eksploitasi | 2 | 2 |
|  | KDRT | 30 | 25 |
|  | Lainnya | 5 | 0 |

***Sumber : BP3AKB Provinsi Jawa Tengah***

**Tabel 2.19**

**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak**

**di Kabupaten Magelang pada Tahun 2009-2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **Jenis Kasus** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| 1 | Kekerasan Seksual Anak | 2 | - | 7 | 23 | 16 |
| 2 | Perkosaan | 11 | 18 | 8 | - | - |
| 3 | Kekerasan Fisik | - | 5 | 3 | 16 | 1 |
| 4 | Persetubuhan Anak | - | 20 | 11 | 1 | 14 |
| 5 | Membawa Lari Anak | - | 6 | - | - | 8 |
| 6 | Pencabulan | - | - | 7 | - | 7 |
| 7 | Penelantaran | - | - | 3 | - | - |
| 8 | *Trafficking* | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Penganiayaan | - | - | 1 | - | 3 |
|  | JUMLAH | 13 | 49 | 41 | 40 | 45 |

Masalah Tingginya Angka Kekerasan Pada Anak

1. Kuatnya Budaya Patriarki
   1. Anakdianggapsebagaikomoditasoleh orang tua
   2. Diskriminasiantaraanaklaki-lakidanperempuan
   3. Anakdianggapmenjadibebankeluarga/orang tua
   4. Kekerasanuntukkepatuhan/kedisiplinan
2. TidakBerkembangnyaBudaya*Assertive*padaAnak
   1. Polaasuhkeluargatidakmemberikanruangpartisipasipadaanak
   2. Metodependidikan konvensional
3. KebijakanPerlindunganAnak yang masihsektoral
   1. Kebijakanperlindungananak yang belummengakomodasi 5 klusterhakanak
   2. Penegakanhokumperlindungananakbelumberjalanbaik
   3. Isu/program perlindungananakbelumdianggappenting
4. Pengaruh Media Hiburan yang tidakmendidik
   1. Kebijakan sensor tayangan TV yang masihlonggar
   2. Kurangnyacontrol/pengawasandariorang tua/keluarga
   3. Maraknyatoko VCD/warnet/game online yang biasdiaksesanak-anak
5. Kurangnyapromosi dan kebijakan perlindungan anak.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut perlu dilakukannya perubahan paradigma Pembangunan Anak. Selama ini pembangunan anak cenderung parsial, segmentatif dan sektoral yang nantinya perlu diubah menjadi pembangunan anak yang holistik, integratif dan berkelanjutan.

**Tabel 2.20**

**Data PMKS Anakdi Kabupaten Magelang pada Tahun 2009-2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama PMKS** | **Tahun** | | | | |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| 1 | Anak balita terlantar | 412 | 374 | 323 | 243 | 182 |
| 2 | Anak terlantar | 796 | 810 | 1.601 | 1.678 | 1.263 |
| 3 | Anak jalanan | 155 | 152 | 192 | 31 | 36 |
| 4 | Anak dengan disabilitas | 2.827 | 2.318 | 2.482 | 2.129 | 2.295 |
|  | **JUMLAH** | **4.190** | **3.654** | **4.598** | **4.081** | **3.776** |

Pola Penanganan penyandang masalah sosial anak melalui rehabilitasi sosial. Ada dua sistem pelayanan yaitu dalam lingkungan keluarga amupun panti.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Dalam lingkungan keluarga

Penanganan anak berbasis keluarga merupakan pola penanganan ideal, namun memerlukan petugas/pekerja sosial yang mampu untuk mendampingi. Sampai dengan saat ini Disnakersostrans belum mempunyai pekerja sosial.

1. Dalam Panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini belum mempunyai panti/LKSA. LKSA yang ada di Kabupaten Magelang sebanyak 30 dikelola oleh masyarkat. Khusus untuk penanganan anak balita terlantar masih meminta bantuan kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga. Guna memberikan pelayanan yang ideal terhadap anak, masing-masing LKSA harus mempunyai pekerja sosial, namun sampai dengan saat ini belum ada LKSA yang mempunyai pekerja sosial.

Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, termasuk penanganan anak yang bermasalah memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Penempatan para pekerja sosial di LKSA maupun di instansi pemerintah yang menangani sosial mutlak diperlukan. Sampai dengan saat ini kita dibantu oleh Peksos Sakti PSMP Antasena dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

**Tabel 2.21**

**Anak Berhadapan dengan HukumBerdasarkan Jenis Kasus**

**di Kabupaten Magelang pada Tahun 2009-2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kasus | Tahun | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Pencurian | 7 | 12 | 18 | 20 | 45 |
| 2 | Pemerkosaan | - | - | - | 5 | 6 |
| 3 | Pencabulan/ pelecehan seksual | - | - | - | 5 | 11 |
| 4 | Tawuran/ perkelahian | - | 1 | 5 | 5 | 19 |
| 5 | Kecelakaan lalu lintas | - | - | - | - | 2 |
| 6 | Penganiayaan | - | - | - | - | 3 |
| 7 | Kenakalan remaja | 10 |  | 14 | 18 | 23 |
| 8 | Miras | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 9 | Geng motor | - | - | - | - | 2 |
| 10 | Pemalakan | - | 1 | - | 1 | - |
| 11 | Penipuan | - | 3 | - | - | - |
| 12 | Rawan ABH/ Kube | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 13 | Balap liar | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Senjata tajam | - | - | - | 2 | - |
|  | JUMLAH | 87 | 128 | 141 | 156 | 194 |

ABH dengan Upaya-upaya Pengadilan Restorasi Masih Rendah

1. Peran Keluarga dan Lingkungan Terdekat Anak Rendah
   1. Orangtua tidak peduli terhadap anakpelaku
   2. Orang tua/keluargamerasatidakmampumengendalikananak
   3. Orang tua/keluarga tidak khawatirakankeselamatananak
   4. “cap negatif” darilingkungansosialanak
2. *Goodwill* Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengadilan Restorasi Rendah
   1. Kurangmemahamihak-hakanak
   2. Belummendapatkanpelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)
   3. Belumadanyaperangkat/fasilitas pembinaan yang sesuaiuntukanak
3. Tuntutan Pihak Keluarga Korban
   1. Untukmemberikanefekjerapadaanakpelaku
   2. Tuntutan rasa keadilan
   3. Pengetahuankeluargakorbantentang KHA rendah
4. Kebijakan Perlindungan Anak yang Belum Berpihak

Perlindungan anak dilaksanakanmelalui tiga fokus prioritas.

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain melalui:
   1. peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini;
   2. peningkatan kualitas kesehatan anak; dan
   3. peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi,antara lain melalui:
   1. peningkatan rehabilitasi dan pelindungan sosial anak;
   2. peningkatan perlindungan bagi pekerja anak; dan
   3. penghapusan pekerja terburuk anak; dan
   4. peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan denganhukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain melalui:
   1. penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkaitperlindungan anak;
   2. peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak;
   3. peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan
   4. peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional maupun internasional.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu dilakukan pendampingan ABH dalam beberapa metode, antara lain :

1. Pelayanan Reguler
2. Daycare Rehabilitation
3. Perlindungan Rawan ABH/Kelompok
4. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) ABH

**Tabel2.22**

**Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender**

**di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013**

| **NO.** | **Jenis Kasus** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 41 | 52 | 47 | 83 | 52 |
| 2 | Kekerasan terhadap anak | - | - | 1 | 2 | - |
| 3 | Perkosaan | - | 1 | 3 | - | 4 |
| 4 | Perbuatan tidak menyenangkan | - | - | 1 | - | - |
| 5 | *TraffiCking* | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Pembuangan anak | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Penelantaran | - | 14 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Perzinaan | - | 5 | 4 | 9 | 7 |
| 9 | Kekerasan terhadap TKW | - | 1 | - | - | - |
| 10 | KDP | - | - | - | 1 | 4 |
| 11 | Pencurian | - | - | - | - | - |
| 12 | Pemalsuan Surat | - | - | - | - | 1 |
| 13 | KSA | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Pelecehan Seksual | - | - | - | - | 2 |
| 15 | Penganiayaan | - | - | - | - | 1 |
|  | **JUMLAH** | **41** | **73** | **60** | **100** | **75** |

Permasalahan kekerasan berbasis gender

1. Nilai sosial budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa)
2. Komunikasi antara suami-istri tidak terbuka dan lancar
3. Latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara)
4. Persepsi yang salah tentang kebebasan terhadap perempuan
5. Memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki
6. Perempuan termasuk wilayah rentan yang cenderung mengalami kekerasan.

Untuk badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kabupaten Magelang untuk saat ini mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kinerjanya yang meliputi

Kurangnya pegawai untuk menangani urusan Perlindungan Permpuan dan anak. Saat ini Bappermaspuan dan KB Kabupaten Magelang urusan perlindungan perempuan dan anak baru ditangani oleh 3 orang pegawai.

Kurangnya dana operasional untuk program perlindungan perempuan dan anak dan untuk pelatihan kader terlatih untuk penanganan terhadap korban kekerasan baik perempuan maupun anak;

Shelter untuk perempuan korban kekerasan belum ada demikian juga rumah singgah untuk perlindungan anak masih bekerja sama dengan Lembaga Swadaya lain, untuk Kabupaten Magelang belum memiliki sendiri.

Urusan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bersifat jejaring dengan lembaga lain. Untuk memperoleh data dari kejaksaan kadang mengalami kendala sehingga untuk mendapatkan data mengenahi korban mengalami kesulitan.

Dapat dilihat dari data tersebut di Kabupaten Magelang terdapat 2 kasus untuk Propinsi Jawa Tengah baru tercover 1 kasus, KDRT tingkat Kabupaten juga lebih besar dibanding Provinsi sebesar 36 kasus, dari Data tersebut dapat dilihat bahawa kasus kekerasan berbasis gender di Kabuupaten Magelang masih perlu penanganan yang lebih intensif.

Untuk itu kerjasama secara lintas sektoral dengan pihak pihak terkait seperti Lembaga bantuan Hukum. Kepolisian maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan Rumah Sakit dalam penyelesaian kasus perempuan sangat diperlukan. Pendiriaan Shelter yang aman bagi korban bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga meegang peranan penting. Rehabilitasi Sosial bagi korban dengan menyediaakan tempat yang aman dan nyaman bagi korban sangat diperlukan untuk pengembalian kepercayaan korban Tahun 2013 ada penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dari 104 kasus menjadi 55 kasus.

Bapermaspuan dan KB mencermati permasalahan ini lewat program peningkatan kualitas perempuan dan anak dengan kegiatan Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Dengan mengadakan kegiatan baru yang berbasis anak diharapkan hak-hak anak dapat dipenuhi, hak-hak anak tersebut meliputi:

1. Hak Hidup
2. Hak Tumbuh Kembang
3. Hak Perlindungan
4. Hak Partisipasi

Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan Anak seperti lembaga Antasena di Kabupaten Magelang sangat mendukung program ini .Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupoaten, Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak sebagai program perlindungan anak mdimaksudkan agar anak dapat terpenuhi hak-haknya diantaranya dapat mengemukakan pendapatnya secara terlembaga, mengakomodasikan keinginan anak sehingga dalam perencanaan pembagunan dapat terakomodir secara baik

Untuk kondisi Pengarusutamaan Gender di wilayah Kabupaten Magelang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.23**  **IPG DAN IDG** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **NO** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| IPG | N/A | 61,25 | 69,15 | 69,41 | Data baru akan dipublikasikan pada tahun 2015 |
| IDG | N/A | 68,2 | 60,79 | 58.97 |

**Tabel 2.26**

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang terhadap Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian PPA, BKKBN, dan Renstra Kementerian Sosial**

| **No** | **Indikator Kinerja** | **Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/ Kota\*** | **Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi\*\*** | **Sasaran pada Renstra K/L\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK** |  |  |  |
| 1 | Cakupan Perempuan Dan anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana KTP/A Dan PPT/PKT Rumah Sakit |  |  |  |
|  | 2010 |  | 96,75 |  |
|  | 2011 |  | 99,17 |  |
|  | 2012 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Di berikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu |  |  |  |
|  | 2010 |  | 100,00 |  |
|  | 2011 |  | 100,00 |  |
|  | 2012 | 75,00 | 100,00 |  |
|  | Cakupan Layanan Bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu |  |  |  |
|  | 2010 |  | 100,00 |  |
|  | 2011 |  | 100,00 |  |
|  | 2012 | 75,00 | 100,00 |  |
|  | Cakupan Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak |  |  |  |
|  | 2010 |  | 96,00 |  |
|  | 2011 |  | 96,00 |  |
|  | 2012 | 80,00 | N/A |  |
|  | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatan layanan Bantuan Hukum |  |  |  |
|  | 2010 |  | 63,00 |  |
|  | 2011 |  | 91,00 |  |
|  | 2012 | 50,00 | 93,10 |  |
|  | Cakupan Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan |  |  |  |
|  | 2010 |  | 86,47 |  |
|  | 2011 |  | 84,37 |  |
|  | 2012 | 50,00 | 84,00 |  |
|  | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan |  |  |  |
|  | 2010 |  | 85,09 |  |
|  | 2011 |  | 81,59 |  |
|  | 2012 | 100,00 | 81,90 |  |
|  | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%) |  |  |  |
|  | 2010 | 2,41 | 0,10 |  |
|  | 2011 | 2,42 | 0,10 |  |
|  | 2012 | 2,43 | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **URUSAN KELUARGA BERENCANA** |  |  |  |
|  | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif 65 % |  |  |  |
|  | 2009 |  | 78,32 |  |
|  | 2010 |  | 78,58 |  |
|  | 2011 |  | 79,08 | 49,60 |
|  | 2012 | 81,19 | 80,19 | 49,70 |
|  | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5,0 % |  |  |  |
|  | 2009 |  | 11,69 |  |
|  | 2010 |  | 11,59 |  |
|  | 2011 |  | 10,95 | 6,20 |
|  | 2012 | 9,13 | 10,26 | 11,40 |
|  | Persentase Drop Out KB |  |  |  |
|  | 2009 | 8,37 | 11,69 |  |
|  | 2010 | 7,69 | 13,11 |  |
|  | 2011 | 8,13 | 14,71 |  |
|  | 2012 | 7,53 | 15,09 |  |
|  | Jumlah Keluarga Prasejahtera |  |  |  |
|  | 2009 | 99.592 | 2.997.390 |  |
|  | 2010 | 100.490 | 2.908.390 |  |
|  | 2011 | 96.610 | 2.826.038 |  |
|  | 2012 | 88.261 | 2.793.948 |  |
|  | Jumlah Keluarga Sejahtera I |  |  |  |
|  | 2009 | 57.082 | 1.813.895 |  |
|  | 2010 | 57.265 | 1.855.649 |  |
|  | 2011 | 58.129 | 1.886.682 |  |
|  | 2012 | 59.500 | 1.905.066 |  |
|  | **URUSAN SOSIAL** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 2009 |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 2009 |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |

**Tabel 2.27**

**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang**

**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peempuan dan Perlindungan Anak**

| **No.** | **Rencana Struktur Ruang** | **Struktur Ruang Saat Ini** | **Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan** | **Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD** | **Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Sistem Perdesaan** |  |  |  |  |
|  | Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) |  | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antar kawasan perdesaan dan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan; dan 2. Mengarahkan pengembangan wilayah di kabupaten melalui pemantapan fungsi PPL dan desa pusat pertumbuhan. | Menjadi kawasan yang memerlukan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan fungsi-fungsi desa tersebut | Integrasi struktur ruang desa dalam dokumen perencanaan pembangunan desa |
|  | Desa Pusat Pertumbuhan | Desa dengan potensi pertanian, industri kecil, atau pariwisata | 1. Menumbuhkan keberadaan pusat pertumbuhan perdesaan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah; 2. Mengembangkan kawasan agropolitan utama; mengembangkan satu desa satu produk berbasis potensi dan daya dukung lokal; 3. Memperkuat basis ekonomi perdesaan dengan pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah; |  | Pemberdayaan diarahkan berdasarkan keahlian masyarakat dan kearifan lokal setempat |
|  | Desa Pendukung |  |  |  |  |
|  | Desa Konservasi/ Desa Tepi Hutan/ Desa Hulu DAS yang merupakan desa di luar sistem KTP2D (Stagnan) |  | 1. Mengembangkan model desa konservasi pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk desa-desa hulu mikro DAS/desa di tepi hutan lindung dan produksi; |  |  |

**Tabel 2.28**

**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang**

**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peempuan dan Perlindungan Anak**

| **No.** | **Rencana Pola Ruang** | **Pola Ruang Saat Ini** | **Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan** | **Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD** | **Arahan Lokasi Perkembangan Pelayanan SKPD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A** | **Kawasan Lindung** |  |  |  |  |
| 1 | Kawasan Hutan Lindung | Kec. Grabag seluas ± 88,25 ha | Konservasi | Pemberdayaan masyarakat mengedepankan aspek kelestarian kawasan lindung | Penyusunan program berbasis masyarakat (RPJM Desa) |
| Kec. Kajoran seluas ± 767,66 ha | Rehab lahan kritis |
| Kec. Kaliangkrik seluas ± 142,21 ha | Pengembangan blok penyangga |
| Kec. Ngablak seluas ± 141,75 ha |  |
| Kec. Windusari seluas ± 332,93 ha |  |
| 2 | kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; | Pelestarian area resapan air, menjaga kualitas kemampuan untuk resapan air, kawasan resapan air di sebagian Kecamatan Bandongan, Kajoran, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun dan Srumbung | a). Perbaikan resapan  b). Penyusunan program berbasis masyarakat (RPJM Desa) | Integrasi pelestarian resapan air dalam dokumen perencanaan desa | Penyusunan program berbasis masyarakat (RPJM Desa) |
| 3 | kawasan perlindungan setempat; | Berupa kawasan sekitar mata air dan sempadan sungai. | a). studi geohidrologi (zonasi mt air).  b). Rekomendasi progr konservs mata air .  c). Mengamankan zona 1. | Pemanfaatan mata air untuk kebutuhan masyarakat | Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS (BP SPAMS) |
| Perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi dari kegiatan budidaya yang dapat merugikan kualitas dan kuantitas air |  |  |
| Perlindungan sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai dan aliran sungai. | a). Penanaman dgn tan keras  b). Pemb tebing, krib pengendali arus,  c). Jalan inspeksi. |  |  |
| Kawasan sempadan sungai ; Sungai besar, sedang, kecil, perkotaan. |  |  |
| 10. | Kawasan peruntukan permukiman | 1. Mengatur penyediaan lahan permukiman guna mengurangi (mengendalikan) alih fungsi lahan pertanian ke permukiman | RP4D, RPIJM CK, BKP4D |  | Fasiltasi Permbangunan Rumah Layak Huni |
|  |  | 1. Terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan |  |  |  |
|  |  | 1. Kawasan permukiman perkotaan pada PKL, ibukota kecamatan, pada kawasan Borobudur dengan mengikuti kaidah penataan KSN dan KSK Borobudur |  |  |  |
|  |  | 1. Kawasan permukiman perdesasaan tersebar diluar ibukota kecamatan |  |  |  |
| **C** | **Kawasan Strategis** |  |  |  |  |
| 1 | Kawasan Strategis Nasional | Kaw Strategis Nasional Borobudur, meliputi; |  |  |  |
|  |  | 1. Subkawasan pelestarian 1 (SP-1) = Kawasan pelestarian utama di Desa Borobudur, Wanurejo, Kel. Mendut, sebagian Desa Ngrajeg, Desa Pabelan, Paremono, Bojong, di Kec. Mungkid |  |  |  |
|  |  | 1. SP-2, kaw pengaman sebaran situs yg belum tergali, meliputi : sebag Kec Brbdr, Mungkid, Mertoyudan, Tempuran & Muntilan. |  |  |  |
|  |  | Borobudur juga ditetapkan sbg Kaw Andalan, dgn sektor unggulan : Pariwisata. |  |  |  |
|  |  | Taman Nas Gn Merapi & Taman Nas Gn Merbabu | Rehabilitasi lahan dan hutan di sekitar Taman Nasional Gunung Merbabu dan Taman Nasional Gunung Merapi |  |  |
| 2 | Kawasan Strategis Provinsi | 1. Koridor Selo-Borobudur, bagian dari Solo-Selo-Borobudur | Sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi |  | Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat |
|  |  | 1. Kawasan Candi Borobudur | Kawsan strategis provinsi dari aspek sosial budaya |  |  |
|  |  | 1. Taman Nas Gn Merapi & Taman Nas Gn Merbabu, | Kaws Stratgs Prov dr aspek Fungsi & Daya dukung Lingk Hidup |  |  |
| 3 | Kawasan Strategis Kabupaten |  |  |  |  |
|  |  | 1. Pada jalur Secang-Magelang-Mertoyudan-Mungkid-Muntilan-Salam | Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, jalur Secang-Magelang-Mertoyudan-Mungkid-Muntilan-Salam studi ini dibuat sekaligus dapat pula dibuat segmen sesuai dengan prioritas |  | Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat |
|  |  | 1. Pada titik-titik yang berdekatan dengan Kota Magelang dimungkinkan pengembangan bangunan secara vertikal |  |  |  |
|  |  | 1. Pada zona tertentu diadakan pengendalian rg secara ketat, berdasarkan ciri khas pemandangan bentang alam |  |  |  |
|  |  | Kaw Strategis Sosial Budaya adalah Kawasan Borobudur dgn dominasi pengembangan Sosial-Budaya. |  | Perlunya pengembangan potensi masyarakat berbasis sosial budaya | Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mendukung pengembangan sosial budaya |
|  |  | Kaw Strategis Fungsi & Dy Dukung Ling Hidup, meliputi : kawasan Borobudur, Kaw Taman Nasional Gn Merapi, Kaw Taman nas Gn Merbabu |  |  |  |
|  |  | Kaw strategis Lainnya, adalah Kawasan Strategis DAS Mikro yang terdapat di dalam Sub DAS Progo Hulu. |  |  |  |

Selain Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magelang (RTRW, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Magelang juga mempengaruhi beberapa kebutuhan pelayanan.

**Tabel 2.29**

**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS**

**Kabupaten Magelang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aspek Kajian** | **Ringkasan KLHS** | **Implikasi terhadap Pelayanan SKPD** | **Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan diindikasi dapat menimbulkan dampak lingkungan yaitu | Hasil kajian menjadi pertimbangan dalam implementasi program mengingat Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ini penting untuk dilaksanakan karena diharapkan mampu mentimulasi swadaya masyarakat untuk mengembangkan sarana prasarana perekenomian desa | Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilakukan dengan tetap memperhatikan sistem pengelolaan lingkungan |
| 1 | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | Dapat memicu konversi lahan pertanian |
| Berdampak terhadap aktivitas masyarakat disekitarnya |
| 2 | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup | Dapat meningkatkan pencemaran lingkungan |
| Menimbulkan konflik sosial |

**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Peempuan dan Perlindungan Anak**